

ANALISIS RASIO KEUANGAN APBD UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Dwi Lafia¹, Etik Umiyati², Rahma Nurjanah³

^{1,2,3}Fakultas ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

¹dwilafia73@gmail.com, ²umiyati.etik@yahoo.com, ³rahmanurjanah@unja.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the development of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and evaluate the financial performance of the Dharmasraya Regency Government during 2015–2024 through financial ratio analysis. The study used secondary time series data from the Regional Government Financial Report (LKPD) and Budget Realization Reports (LRA) of Dharmasraya Regency and applied a descriptive qualitative method. The results showed that APBD development fluctuated during the period. The regional financial independence ratio was 10.56 percent (very low), indicating strong dependence on central transfers. The PAD effectiveness ratio was 93.21 percent (moderately effective), while the financial efficiency ratio was 89.61 percent (moderately efficient). The fiscal decentralization ratio was 9.31 percent (very poor). The operational expenditure harmony ratio reached 76.01 percent (good), whereas the capital expenditure harmony ratio was 23.50 percent (poor). In addition, the PAD growth ratio was 9.72 percent (low). Overall, the financial performance of Dharmasraya Regency still needs improvement through PAD optimization.

Keywords: *Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), Regional Financial Performance, Financial Ratios, Regional Original Revenue (PAD)*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2015–2024 melalui analisis rasio keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk time series yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dharmasraya dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan APBD mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 10,56 persen (sangat rendah), yang menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat. Rasio efektivitas PAD sebesar 93,21 persen (cukup efektif), sedangkan rasio efisiensi keuangan sebesar 89,61 persen (cukup efisien). Rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 9,31 persen (sangat kurang). Rasio keserasian belanja operasi mencapai 76,01 persen (baik), sedangkan rasio keserasian belanja modal sebesar 23,50 persen (tidak baik). Selain itu, rasio pertumbuhan PAD sebesar 9,72 persen (rendah). Secara umum, kinerja keuangan Kabupaten Dharmasraya masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi PAD.

Kata Kunci: *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kinerja Keuangan Daerah, Rasio keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD).*

A. Pendahuluan

Penerapan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian, tetapi juga sebagai indikator kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, evaluasi terhadap APBD menjadi penting untuk menilai sejauh mana kinerja keuangan pemerintah daerah telah berjalan sesuai tujuan pembangunan daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur melalui analisis rasio keuangan yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Analisis ini memberikan gambaran mengenai tingkat kemandirian daerah, efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi

penggunaan anggaran, derajat desentralisasi fiskal, keserasian alokasi belanja, serta pertumbuhan pendapatan daerah. Semakin baik nilai rasio keuangan yang dicapai, maka semakin baik pula kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan masih adanya ketergantungan fiskal, kurang optimalnya pendapatan daerah, serta belum seimbangnya alokasi belanja pembangunan.

Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Barat terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan data APBD tahun 2020–2024, pendapatan daerah mengalami fluktuasi dari Rp990,19 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp970,82 miliar pada tahun 2024. Pendapatan Asli Daerah cenderung meningkat, namun kontribusinya terhadap total pendapatan masih relatif kecil dibandingkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Di sisi belanja, belanja operasi masih mendominasi, sedangkan belanja modal cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur fiskal daerah masih

menghadapi tantangan dalam mewujudkan kemandirian keuangan dan peningkatan kualitas pembangunan.

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya analisis yang komprehensif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan APBD serta menilai kinerja keuangan daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2015–2024 melalui analisis rasio keuangan APBD. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat akademis sebagai referensi pengembangan ilmu keuangan publik, serta manfaat praktis sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan PAD, efisiensi belanja, dan penguatan kemandirian fiskal daerah.

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis perkembangan APBD dan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2015–2024. Data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk time series

yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Kabupaten Dharmasraya.

Alat Analisis data yang digunakan terdiri dari dua pendekatan pada penelitian ini yaitu:

1. Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2015-2024, berdasarkan data laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari total realisasi pendapatan, total realisasi belanja, dengan rumus sebagai berikut:
 - a. Perkembangan Pendapatan Daerah:

$$\frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } t-1}{\text{Pendapatan Tahun } t-1} \times$$

100%

- b. Perkembangan Belanja Daerah

$$\frac{\text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja Tahun } t-1}{\text{Belanja Tahun } t-1} \times$$

100%

2. kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya ditinjau dengan menggunakan rasio keuangan APBD, sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian Daerah:

$$= \frac{PAD}{Pendapatan\ transfer} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas PAD:

$$= \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

$$= \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Realisasi\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

d. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal:

$$= \frac{PAD}{Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

e. Rasio Kesenjangan

Rasio Belanja Operasi

$$= \frac{Total\ Belanja\ Operasi}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal

$$= \frac{Total\ Belanja\ Modal}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

f. Rasio Pertumbuhan PAD

$$= \frac{PAD_{tahun\ t} - PAD_{tahun\ t-1}}{PAD_{tahun\ t-1}} \times 100\%$$

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berdasarkan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2015–2024 mengalami fluktuasi

pada sisi pendapatan maupun belanja daerah. Pendapatan daerah cenderung meningkat dalam jangka panjang, namun masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil. Di sisi belanja, alokasi anggaran lebih banyak digunakan untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan investasi daerah masih terbatas.

Tabel 1 **Perekembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2024**

Tahun	Pendapatan Daerah (dalam miliar rupiah)	Perkembangan
2015	794,43	-
2016	875,20	10,17
2017	949,02	8,44
2018	923,54	-2,69
2019	1.019,36	10,37
2020	990,19	-2,86
2021	978,92	-1,14
2022	911,08	-6,93
2023	937,51	2,90
2024	970,82	3,55
Rata-rata		3,74

Sumber: *Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2024*

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel. 1 diatas tampak bahwa pendapatan daerah Kabuapten Dharmasraya Periode 2015-2024 mengalami fluktuasi sehingga belum stabil, dengan rata-rata pertumbuhan

3,74%. Kenaikan terjadi pada 2016, 2017, 2019, 2023, dan 2024, terutama didorong peningkatan dana transfer pusat, optimalisasi PAD, serta pemulihan ekonomi daerah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2019 sebesar 10,37%, sedangkan penurunan terendah terjadi pada 2022 sebesar -6,93% akibat dampak lanjutan pandemi Covid-19 yang menekan aktivitas usaha dan penerimaan PAD. Secara umum, kondisi ini menunjukkan pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer dan belum sepenuhnya didukung PAD yang kuat, sehingga pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi ekonomi, memperbaiki sistem pemungutan, dan meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah.

Tabel 2 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2024

Tahun	Belanja Daerah (dalam miliar rupiah)	Perkembangan
2015	752,81	-
2016	804,05	6,81
2017	834,31	3,76
2018	826,10	-0,98
2019	917,36	11,05
2020	878,48	-4,24
2021	805,12	-8,35
2022	829,32	3,01
2023	822,04	-0,88
2024	897,85	9,22
Rata-rata		3,48

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dharmasraya Tahun

2015-2024

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel. 2 diatas tampak bahwa pendapatan daerah Kabuapten Dharmasraya Periode 2015-2024 mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan 3,48%. Kenaikan belanja terjadi pada beberapa tahun, terutama tertinggi pada 2019 sebesar 11,05% karena peningkatan pembangunan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Penurunan terdalam terjadi pada 2021 sebesar -8,35% akibat pandemi Covid-19 dan kebijakan refocusing anggaran. Secara umum, belanja daerah menunjukkan tren meningkat dalam jangka panjang, namun dipengaruhi kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan pelayanan publik, serta mengelola keuangan daerah secara hati-hati dan berkelanjutan..

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Ditinjau Dengan Menggunakan Rasio Keuangan APBD

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Rasio ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan keuangannya tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Adapun hasil perhitungan dari rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel. 3 dibawah ini.

**Tabel 3 Perhitungan Rasio Kemandirian
Keuangan Daerah Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2015-2024
(dalam miliar rupiah)**

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	RKKD
2015	56,69	735,64	7,71%
2016	56,45	815,76	6,92%
2017	98,94	832,00	11,89%
2018	84,12	808,47	10,40%
2019	78,88	906,78	8,70%
2020	82,88	872,43	9,50%
2021	82,83	838,66	9,88%
2022	108,01	786,48	13,73%
2023	116,00	819,53	14,15%
2024	109,37	850,69	12,74%
Rata-rata			10,56%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio kamandirian keuangan daerah selama periode 2015-2024 mengalami fluktuasi atau tidak stabil setiap tahunnya namun seluruhnya berada pada kategori rendah sekali, dengan rata-rata hanya 10,56%. Hal ini menunjukkan kemampuan daerah membiayai pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dari PAD masih sangat terbatas sehingga sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Rasio tertinggi terjadi pada 2023 sebesar 14,15%, sedangkan terendah pada 2016 sebesar 6,62%. Rendahnya kemandirian disebabkan belum optimalnya penerimaan pajak dan retribusi, rendahnya kepatuhan wajib pajak, belum berkembangnya sektor ekonomi unggulan, serta ketergantungan pada komoditas sawit dan tambang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pendataan wajib pajak, digitalisasi pemungutan, serta mendorong diversifikasi ekonomi agar PAD meningkat, ketergantungan transfer berkurang, dan kinerja keuangan daerah menjadi lebih mandiri serta berkelanjutan.

b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah direncanakan.

**Tabel 4 Perhitungan Rasio Efektivitas
 PAD Kabupaten Dharmasraya
 Tahun 2015-2024
 (dalam miliar rupiah)**

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio efektivitas
2015	56,69	67,76	83,67%
2016	56,45	70,53	80,04%
2017	98,94	108,03	91,58%
2018	84,12	80,09	105,03%
2019	78,88	100,17	78,75%
2020	82,88	84,18	98,45%
2021	82,83	84,35	98,19%
2022	108,01	105,42	102,46%
2023	116,00	110,23	105,23%
2024	109,37	122,24	88,65%
Rata-rata			93,21%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2024

Berdasarkan data rasio efektivitas PAD selama periode 2015-2024, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan PAD mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun secara umum berada pada kategori cukup efektif dengan rata-rata 93,21%. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah cukup mampu merealisasikan target PAD yang ditetapkan dalam APBD, meskipun

pada beberapa tahun target belum tercapai. Rasio tertinggi terjadi pada 2023 sebesar 105,23% yang menandakan penerimaan PAD melampaui target, sedangkan terendah pada 2019 sebesar 78,75% karena realisasi PAD jauh di bawah target. Kondisi ini dipengaruhi kinerja pemungutan pajak dan retribusi, aktivitas ekonomi daerah, serta ketepatan penetapan target PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperbaiki metode penetapan target berbasis data potensi riil, meningkatkan sistem pemungutan, dan memperkuat perencanaan anggaran agar efektivitas PAD dapat mencapai kategori sangat efektif.

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara jumlah realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah. Semakin kecil nilai rasio efisiensi tersebut, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.

Tabel 5 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2024 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Belanja Daerah	Pendapatan daerah	REKD
2015	752,81	794,43	94,76%
2016	804,05	875,20	91,87%
2017	834,31	949,02	87,91%
2018	826,10	923,54	89,45%
2019	917,36	1.019,36	89,99%
2020	878,48	990,19	88,72%
2021	805,12	978,92	88,25%
2022	829,32	911,08	91,03%
2023	822,04	937,51	87,68%
2024	897,85	970,82	92,48%
Rata-rata			89,61%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Dharmasraya selama periode 2015-2024 menunjukkan fluktuasi dengan rata-rata 89,61% dan berada pada kategori cukup efisien. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah cukup mampu mengendalikan belanja agar tetap sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Rasio efisiensi terbaik terjadi pada 2023 sebesar 87,68%, sedangkan tertinggi pada 2015 sebesar 94,76% yang menandakan ruang fiskal lebih sempit karena hampir seluruh pendapatan

digunakan untuk belanja. Meski cukup baik, beberapa tahun masih tergolong kurang efisien akibat tingginya belanja rutin, kebutuhan pembangunan yang besar, dan lemahnya pertumbuhan pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pengendalian belanja, menerapkan anggaran berbasis kinerja, serta mengarahkan anggaran pada program yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

d. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengotimalkan penghasil dari sumber-sumber pendapatan lokal. Pemerintah daerah yang memiliki tingkat desentralisasi tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu membiayai kebutuhan pemerintahannya secara lebih mandiri.

Tabel 6 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2024 (dalam miliar rupiah)

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	RDDF
2015	56,69	794,43	7,14%
2016	56,45	875,20	6,45%
2017	98,94	949,02	10,43%
2018	84,12	923,54	9,11%
2019	78,88	1.019,36	7,74%

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	RDDF
2020	82,88	990,19	8,37%
2021	82,83	978,92	8,46%
2022	108,01	911,08	11,86%
2023	116,00	937,51	12,37%
2024	109,37	970,82	11,16%
Rata-rata			9,31%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwasanya kinerja keuangan dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Dharmasraya pada periode 2015-2024 berada pada kategori kurang dan sangat kurang, dengan rata-rata 9,31% sehingga menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih rendah. Kondisi ini menandakan kemampuan daerah membiayai pembangunan secara mandiri masih terbatas dan masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Rasio tertinggi terjadi pada 2023 sebesar 12,37% yang menunjukkan adanya perbaikan kontribusi PAD, sedangkan terendah pada 2016 sebesar 6,45%. Rendahnya rasio ini disebabkan terbatasnya basis pajak dan retribusi, belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal, serta lemahnya

sumber pendapatan daerah lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperluas sumber PAD melalui pengembangan BUMD, optimalisasi aset daerah, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat.

e. Rasio Kereasian

Rasio ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya antara belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Dalam dalam rasio keserasian ini ada 2 perhitungan, yaitu rasio belanja operasional dan belanja modal. Hasil dari perhitungan kedua rasio ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7 Perhitungan Rasio Belanja Operasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2024
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Belanja operasi	Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi
2015	504,82	752,81	67,06%
2016	538,03	804,05	66,92%
2017	563,78	834,31	67,57%
2018	609,83	826,10	73,82%
2019	690,74	917,36	75,30%
2020	659,03	878,48	75,02%
2021	638,71	805,12	79,33%
2022	696,16	829,32	83,94%

Tahun	Belanja operasi	Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi
2023	680,83	822,04	82,82%
2024	793,18	897,85	88,34%
Rata-rata			76,01%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio keserasian belanja operasi Kabupaten Dharmasraya tahun 2015-2024, mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren cenderung meningkat dan seluruhnya berada pada kategori baik, dengan rata-rata 76,01%. Hal ini menunjukkan sebagian besar anggaran digunakan untuk kebutuhan operasional. Rasio terendah terjadi pada 2016 (66,92%) yang memberi ruang lebih besar untuk pembangunan, sedangkan tertinggi pada 2024 (88,34%) yang mengindikasikan dominasi belanja rutin sehingga perlu diwaspadai karena dapat membatasi anggaran pembangunan.

Tabel 8 Perhitungan Rasio Belanja Modal Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2024 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi
2015	247,44	752,81	67,06%
2016	265,43	804,05	66,92%

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi
2017	270,15	834,31	67,57%
2018	216,70	826,10	73,82%
2019	226,60	917,36	75,30%
2020	164,53	878,48	75,02%
2021	166,25	805,12	79,33%
2022	123,79	829,32	83,94%
2023	137,28	822,04	82,82%
2024	102,16	897,85	88,34%
Rata-rata			76,01%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio keserasian belanja modal Kabupaten Dharmasraya tahun 2015-2024 mengalami fluktuasi dengan tren menurun dan seluruhnya berada pada kategori tidak baik karena selalu di bawah 50%. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 33,01%, sedangkan terendah pada tahun 2024 sebesar 11,38%. Rata-rata rasio belanja modal selama periode tersebut hanya 23,50%, yang menunjukkan bahwa alokasi APBD lebih banyak diprioritaskan untuk belanja operasi dibandingkan pembangunan infrastruktur dan investasi jangka panjang. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya kebijakan anggaran daerah dalam

mendorong pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengendalikan belanja rutin serta meningkatkan porsi belanja modal agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan.

Sebagian besar anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya masih diprioritaskan untuk belanja operasi, sehingga porsi belanja modal relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan pengeluaran daerah lebih berfokus pada kebutuhan rutin dibanding pembangunan. Jika terus berlanjut, ruang anggaran untuk infrastruktur dan fasilitas publik akan semakin terbatas. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengendalikan belanja operasi, terutama belanja pegawai dan biaya rutin, serta meningkatkan alokasi belanja modal secara konsisten guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

f. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan PAD merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Untuk melihat perhitungan rasio pertumbuhan PAD

dari tahu ke tahun dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 9 Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2024
(dalam miliar rupiah)

Tahun	PAD Tahun t	PAD Tahun t-1	Rasio Pertumbuhan PAD
2015	56,69	52,81	7,35%
2016	56,45	56,69	-0,42%
2017	98,94	56,45	75,25%
2018	84,12	98,94	-14,98%
2019	78,88	84,12	-6,22%
2020	82,88	78,88	5,06%
2021	82,83	82,88	-0,06%
2022	108,01	82,83	30,40%
2023	116,00	108,01	7,39%
2024	109,37	116,00	-6,57%
Rata-rata			9,72%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Dharmasraya tahun 2015-2024 berada pada kategori rendah dengan rata-rata 9,72% serta bersifat fluktuatif dan belum stabil. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 75,25% akibat optimalisasi pemungutan pajak dan membaiknya aktivitas ekonomi, sedangkan terendah pada tahun 2018 sebesar -14,98% yang menunjukkan penurunan penerimaan PAD. Kondisi

ini menandakan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah masih belum optimal, dipengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak, belum maksimalnya pengelolaan pajak dan retribusi, serta ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengelolaan PAD, meningkatkan pengawasan, memperluas basis pendapatan, dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah agar pertumbuhan PAD lebih stabil dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait perkembangan APBD berdasarkan pendapatan daerah dan belanja daerah dan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2015-2024 ditinjau dengan menggunakan rasio keuangan APBD, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan APBD Kabupaten Dharmasraya dari sisi pendapatan daerah dan belanja daerah selama periode 2015-2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi, dengan rata-

rata perkembangan pendapatan daerah sebesar 3,74% dan rata-rata perkembangan belanja daerah sebesar 3,48%.

2. Hasil penelitian rasio keuangan APBD selama tahun 2015-2024 menunjukkan untuk rasio kemandirian keuangan daerah memiliki rata-rata sebesar 10,56% , rasio efektivitas PAD dengan rata-rata sebesar 93,21%, sedangkan rasio efisiensi keuangan daerah dengan rata-rata sebesar 89,61%. Sementara itu, rasio derajat desentralisasi fiskal dengan rata-rata sebesar 9,31%, rasio keserasian belanja operasi mencapai rata-rata sebesar 76,01% dan rasio keserasian belanja modal dengan rata-rata 23,50%. Adapun rasio pertumbuhan PAD dengan rata-rata sebesar 9,72%.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, sehingga dapat saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya diharapkan perlu meningkatkan stabilitas

APBD dengan mengoptimalkan PAD, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, serta mengelola belanja daerah secara efisien dan tepat sasaran. Selain itu, alokasi belanja modal perlu ditingkatkan ganu menunjang pembangunan daerah dan pelayanan publik sehingga APBD menjadi lebih sehat dan berkelanjutan.

2. Pemerintah Kabupaten Dharmastraya perlu terus memperkuat upaya dalam mewujudkan kinerja keuangan daerah yang lebih optimal serta mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan daerah. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui peningkatan PAD, meminimalisir alokasi belanja rutin dan meningkatkan belanja modal, serta memanfaatkan segala aset daerah secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugeraheni, N. K. D., & Yuniarta, G. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Desa dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 426–437.
- Dan, P., Daerah, B., Enrekang, K., Menilai, U., & Fani, R. (2025). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2019-2023*. 04(1), 1–12.
<https://doi.org/10.35905/moneta.v4i1.14440>
- Hariani, S., Veny, Xiaoli, C., & Mohammed, I. S. (2023). Analysis of Financial Ratios To Assess Local Government Financial Performance in Labuhan Batu District, North Sumatra, Indonesia. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 05(01), 14–24.
<https://doi.org/10.56293/ijmsssr.2022.4546>
- Hartoto, Arifah Fibri Andriani, Nina Andriana, Muh Nurkhamid, Syanni Yustiani, Ita Rakhmawati, Sriyani, Rachma Aprilia, Edi Sunyoto, Elly Astuti, Lestari Kurniawati, R. D. A. (2025). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Teori dan Praktik)* (M. S. Ir. Hartoto (ed.); Pertama). Widina Media Utama.
- Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M. M. (2021). *A nalisis kemampuan keuangan daerah*

dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah provinsi nusa tenggara timur *Analysis of regional financial capacity in the context of implementing regional autonomy in the province of East Nusa Tenggara*. 17(1), 184–197.

Pangestu, K. D., & Andriana, N. (2022). Financial Ratio Analysis In Assessing The Financial Performance Of The Regional Government of Pemalang Regency. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(3), 1373–1385.
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. (2021). Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Inspektorat. *Pemerintah Kabupaten Dharmasraya*, 54.
<https://dharmasrayakab.go.id/profil/>

Usemahu, R. H., & Latuamury, S. E. (2024). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Ambon*. 3(2), 7–12